



Cegah Stigma Negatif Pada Korban

■ DP3AP2 DIY Terlibat Tangani Kasus Pencabulan Siswa SD Swasta Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY kini menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di sebuah SD swasta di Kota Yogyakarta. Dia menjelaskan, penanganan dilakukan dengan mengedepankan dan berpihak kepada korban serta keluarga korban.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono menjelaskan, kasus kekerasan seksual ini berkaitan dengan kondisi psikologi korban, apalagi munculnya stigma membuat yang bersangkutan tidak berani melapor. Apalagi, korban masih usia SD yang diklaim masih sangat panjang masa depannya.

"Maka, kita lakukan *healing* melalui Dinas P3AP2 bekerja sama dengan komisi-komisi perlindungan anak dan perempuan," katanya di Kompleks Kepatihan, Jumat (12/1).

Di samping itu, pengawalan kasus ini juga diserahkan kepada pihak kepolisian yang berwenang.

"Si korban dan keluarga korban harus dilindungi supaya stigma itu tidak muncul. Karena usianya masih panjang sekali baru SD, jadi harus ada *healing* pendampingan dan sebagainya," ujarnya.

Disinggung mengenai proses perekrutan tenaga pendidik atau guru di sekolah, Beny menegaskan bahwa hal tersebut mengedepankan seleksi yang ketat termasuk menilai rekam jejak calon guru.

"Tapi perilaku itu kan (sulit ditebak). Kalau seleksinya kita pada seleksi guru kan ada seleksi tentang *track record*, ya, apakah pernah tersangkut perkara pola-pola itu sudah dilakukan, kemudian bagaimana cara memberikan pelajaran," jelasnya.

Menurutnya, penting bagi instansi pendidikan untuk menyeleksi setiap guru ter-

HATI-HATI

- DP3AP2 DIY kini menangani kasus kekerasan seksual di sebuah SD swasta Kota Yogyakarta.
- Penanganan kasus berpihak kepada korban serta keluarga korban.
- Jangan sampai ada stigma membuat yang bersangkutan tidak berani melapor.
- Pendampingan psikologis diperlukan karena masa depan korban masih panjang.

kait perilaku yang hendak mengajar di sekolah tertentu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, Erlina Hidayati Sumardi, mengatakan, kasus pelecehan seksual yang diduga dialami sejumlah murid di salah satu SD swasta itu kini telah ditangani oleh dinas terkait. Pihaknya juga bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengusut tuntas serta memberikan pendampingan kepada korban.

"Kasus tersebut sudah berproses hukum, sudah ditangani awal oleh Polresta Jogja. Kami dampingi penanganannya bersama dengan KPAID Jogja, DP3AP2KB Jogja, UPT PPA Jogja, Dindikpora Jogja, FPKK, dan Rifka Anisa," pungkasnya.

Ketua KPAID Kota Yogyakarta, Sylvi Dewajanti, sebelumnya mengatakan, dari belasan anak, berdasarkan pemeriksaan pihak kepolisian, sampai sejauh ini baru satu korban yang telah terbukti menerima pelecehan seksual. Meski demikian, ia mengatakan, proses pendalaman kasus terus ditempuh Polresta Yogyakarta, dengan metode selaras penanganan kasus anak.

"Untuk pendalaman kasus, sampai detik ini memang baru satu, baru satu, yang terbukti ada. Jadi, tidak seheboh 15," ujar Sylvi.

Menurutnya, polisi sedang mendalami kasusnya

dan melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di sekolah dengan cara dan metode khas untuk anak. Sementara untuk penanganan dan pendampingan, pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Dia menjelaskan, kedua belah pihak sudah menyepakati, terkait secara psikologis dan hukum, akan dikordinir oleh UPT di bawah naungan DP3AP2 Kota Yogya tersebut. "UPT PPA akan mengkoordinir penanganan psikologisnya untuk 10 anak-anak lain di SD yang karena viral juga terkena dampaknya. Jadi, ini kita semua harus sama-sama bekerja secara lebih halus supaya anak-anak tidak menjadi korban berikutnya," ungkapnya.

Selanjutnya, KPAID Kota Yogyakarta akan melakukan upaya pencegahan, dengan meningkatkan kerjasama bareng DP3AP2 dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta.

Sejauh ini, pihaknya telah menumuskan beberapa langkah pencegahan, seperti bagaimana melakukan seleksi terhadap guru-guru honorer. "Karena yang masuk di KPAID itu untuk kasus kekerasan hampir semua dilakukan oleh guru-guru non PNS, ASN, karena ASN saringannya sudah sangat bagus. Nah, ini harus dibentuk sistem itu," pungkasnya. **(han/aka)**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005